

## Pendapa Rumdin Bupati Karanganyar Segera Diresmikan

**KARANGANYAR (KR)** - Raja Mangkunegara Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara X Bhre Cakrahuto Wira Sudjiwa diundang menghadiri peresmian Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar pada Sabtu (21/1) mendatang. Raja Mangkunegara akan menyaksikan bangunan senilai Rp 15,7 miliar dengan arsitektur kubah mirip mahkota Raden Mas Said.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengatakan proyek bersumber APBD 2022 tersebut sudah rampung. Meski, rekanan harus membayar penalti lantaran perpanjangan pengerjaan selama 30 hari. Seharusnya proyek itu selesai pada Desember 2022. "Mangkunegara X menyediakan waktu longgarnya pada Sabtu malam nanti. Untuk menghadiri peresmian Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar," katanya.

Pendapa rumah dinas dirombak total kemudian dibangun dengan arsitektur istimewa. Atapnya dibuat menyerupai mahkota atau kuluk Raja Mangkunegara I atau Raden Mas Said alias Pangeran Samberyawa. Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan sudah sepatutnya Raja Mangkunegara menghadiri peresmian monumen tersebut. Ini sekaligus penghormatan terhadap Mangkunegara I. "Karanganyar sangat akrab dengan Mangkunegara. Ini nyata dan menjadi kebanggaan kita," katanya.

Selain meresmikan pendapa rumah dinas, bangunan itu juga akan dikenal dengan nama Joglo Raden Mas Said. Seluruh penggunaan aset di sana di bawah kelola Bagian Umum Setda Pemkab Karanganyar. Tak ubahnya pendopo rumah dinas yang lalu, masyarakat maupun kedinasan boleh menyelenggarakan event di sana. Kapasitas tamu Joglo Raden Mas Said 600 orang atau 1,5 kali dari kapasitas pendopo rumah dinas lalu. (Lim)-d

## DLH Sukoharjo Berencana Buka TPA Baru

**SUKOHARJO (KR)** - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo melakukan kajian terhadap kondisi tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Mojorejo Bendosari. Sebab kondisi TPA sekarang volume sampah mencapai 200 ton perhari dan terus naik. Selain itu diperkirakan akan penuh. Hal penting dalam kajian tersebut terkait mencari tempat alternatif membuka TPA baru di wilayah selatan Kabupaten Sukoharjo dengan sasaran di Kecamatan Tawang Sari, Weru dan Bulu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo Agus Suprpto, Senin (16/1) mengatakan, DLH Sukoharjo pada tahun 2023 ini akan melakukan kajian terhadap keberadaan TPA Mojorejo Bendosari. Kajian dilakukan untuk melihat kondisi sekarang dan perkiraan perkembangan dalam beberapa tahun kedepan.

Hal tersebut penting mengingat kondisi volume sampah buangan masyarakat sekarang mencapai 200 ton perhari. Volume sampah tersebut diperkirakan akan terus mengalami peningkatan kedepan. Pada pelaksanaan kajian TPA Mojorejo Bendosari tersebut, DLH Sukoharjo sudah menyiapkan anggaran. Kajian diharapkan bisa segera dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Kajian dilakukan terkait kondisi TPA Mojorejo Bendosari. Termasuk mencari tempat alternatif membuat TPA baru mengingat volume sampah buangan masyarakat terus mengalami peningkatan," ujarnya. Agus menegaskan, DLH Sukoharjo akan melakukan kajian dengan cermat termasuk perhitungan matang sebagai bagian dari upaya Pemkab Sukoharjo menyediakan TPA. Sebab sampai sekarang Pemkab Sukoharjo hanya memiliki satu TPA saja di wilayah Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari. Sedangkan di beberapa daerah lain sudah memiliki lebih dari satu TPA.

DLH Sukoharjo akan memaksimalkan keberadaan satu TPA yang dimiliki dalam pengelolaan sampah. Sampah yang ada dikelola dari bawah yakni melibatkan desa dan kecamatan sehingga tidak terjadi penumpukan berlebih.

Membuka TPA baru sengaja dipilih sebagai alternatif tempat pembuangan sampah bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Apabila dipaksakan satu TPA saja maka ke depan Pemkab Sukoharjo dikatakan Agus akan mengalami kesulitan. (Mam)-d

## Seleksi PPS Diikuti dari 3 Kecamatan



KR-Thoha

Proses tes wawancara terhadap salah satu peserta.

**MAGELANG (KR)** - Peserta dari tiga kecamatan di wilayah Kota Magelang mengikuti seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilu Tahun 2024 mendatang. Kegiatan seleksi dilaksanakan KPU Kota Magelang di Trio Front One Resort Magelang selama 3 hari mulai Minggu (15/1) hingga Selasa (17/1).

Hal ini dibenarkan Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron saat ditemui KR di Trio Front One Resort Magelang, Senin (16/1). Seleksi dilaksanakan bergantian untuk setiap kecamatannya. Ini seperti Senin kemarin, yang khusus dilaksanakan bagi peserta yang berasal dari wilayah Kecamatan Magelang Selatan. Minggu lalu khusus untuk peserta dari wilayah Kecamatan Magelang Utara, dan Selasa (17/1) ini bagi peserta dari wilayah Kecamatan Magelang Tengah. Satu per satu peserta secara bergantian memasuki salah satu ruangan untuk mengikuti proses seleksi wawancara.

Dikatakan Basmar, sebelumnya tercatat ada sekitar 161 peserta dari 3 wilayah kecamatan tersebut yang mengikuti seleksi tertulis dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Hanya saja dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) tersebut hanya sekitar 150 peserta.

Dalam tes wawancara di antaranya untuk mengetahui kedalaman peserta mengenai pengetahuan kepemiluan, tentang integritas dan semangat mereka, tujuan mereka mendaftarkan diri menjadi anggota PPS itu apa. Juga pengetahuan kewilayahan maupun lainnya. Pengumuman hasil seleksi wawancara ini dilakukan 18 Januari 2023, dan pelantikan rencana tanggal 24 Januari 2023. Setelah pelantikan, pembentukan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantari), mengingat waktunya sudah mepet. Setelah itu pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) maupun lainnya. (Tha)-d

## Digelar Lomba Lato-lato Khusus Anak-anak

**BOYOLALI (KR)** - Mempopulerkan kembali permainan tradisional di tengah maraknya permainan gadget zaman sekarang, Pemerintah Desa (Pemdes) Kiringan, Kecamatan Boyolali Kota, Kabupaten Boyolali, menggelar Lomba Lato-lato di foodcourt Kimura bekas Sekolah Dasar (SD) Kiringan, Minggu (15/1).

Sembari menunggu dimulainya perlombaan, anak-anak sudah asyik mengasah skill permainan lato-lato. Di perlombaan, tiap peserta diberi kesempatan sekali ketika gagal didiskualifikasi. Salah satu peserta Farel (6) mengaku sudah berlatih intens memainkan lato-lato sejak dapat kabar dua minggu terakhir. "Asyik saja mainnya, apalagi tahu mau dilombakan jadi makin semangat berlatih," ujar Farel.



KR-Mulyawan.

Anak-anak Peserta lomba berlatih lato-lato.

Kepala Desa (Kades) Kiringan, Sri Wuryanto, mengatakan kegiatan Lomba Lato-lato diinisiasi oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Desa Kiringan. Sekaligus memperkenalkan Desa Kiringan kepada masyarakat luas. Kemudian, bagi UMKM, kegiatan lomba lato-lato tersebut

dapat mengurangi anak-anak bermain gadget." Kata Sri Wuryanto.

Jumlah peserta total ada 90 anak dari tiga kabupaten yakni, Kabupaten Semarang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Semua peserta lomba usia Sekolah Dasar (SD). "Peserta asal Kabupaten Semarang dari Desa Kradenan dan Desa Kaliwungu. Sedangkan dari Kabupaten Klaten dari Desa Tulung. Untuk daerah Boyolali, ada beberapa dari Kiringan, Cepogo, Banyudono, Mojosongo, dan banyak daerah lain," ujar Sri Wuryanto.

Hadiah dalam lomba tersebut akan diambil juara I, II, III, dan juara harapan I. Untuk juara I akan mendapatkan hadiah uang Rp 500.000, juara II Rp 300.000, dan juara III Rp 200.000. (R-3)-d

## Peran Masyarakat Hilangkan Pungli di Jembatan Timbang

**SEMARANG (KR)** - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, masyarakat memiliki peran penting terhadap bebasnya praktik pungutan liar di jembatan timbang yang ada Jawa Tengah. Masyarakat yang tertib aturan, membuat reformasi birokrasi jadi lebih mudah terlaksana.

Ganjar Pranowo mengatakan hal itu kepada wartawan di Semarang, Senin (16/1). Jembatan timbang yang kini bebas dari pungli bukan semata-mata karena sidaknya di Jembatan Timbang Subah, Batang pada 2014 silam. Masyarakat juga punya andil dengan cara menaati aturan.

Ganjar mengatakan pihaknya memberi apresiasi kepada para pengusaha dan juga sopir truk yang tertib aturan. Salah satunya menjaga muatan truk tidak Over

Load dan Over Dimensi (ODOL). Ketertiban para pengusaha tersebut merupakan dukungan yang menyebabkan tidak ada lagi pungli di jembatan timbang.

Menurut Ganjar Pranowo, sejak temuannya di tahun 2014, pemerintah terus melakukan perbaikan. Ganjar mengaku banyak sopir truk yang berani mencatut namanya jika menemukan oknum pungli. "Tapi intinya itu adalah kepuasan masyarakat dengan kehadiran pemerin-

tah dan reform di dalam sistem transportasi dan kita improvisasi terus untuk perbaikan," tegasnya.

Ganjar menuturkan, saat ini kewenangan jembatan timbang langsung ditangani oleh pemerintah pusat. Namun demikian, pihaknya akan terus aktif membantu dan menjaga jembatan timbang bebas dari pungli. Bahkan Ganjar mengatakan jika masih menemukan adanya pungli di jembatan timbang, dirinya tidak segan lang-

sung lapor ke Dirlantas untuk ditindaklanjuti.

Dengan adanya sipa tegas dari pemerintah, para sopir truk yang melintas di Jawa Tengah kini merasa nyaman. Mereka tidak lagi waswas dan tidak harus menyiapkan "amplop" untuk bisa lolos dari jembatan timbang. Saat ini juga dibentuk Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah X Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang terdiri dari 10 jembatan timbang, yaitu di Tanjung (Brebek), Subah (Batang), Sarang (Rembang), Banyudono (Boyolali), Klepu (Kabupaten Semarang), Ajibarang (Banyumas), Wanareja (Cilacap), Kulwaru (Kulon-

progo), Kalitirto dan Tamanmartani (Sleman).

"Sejak peristiwa Pak Ganjar sidak di jembatan timbang, ada banyak perubahan kebijakan. Antara lain, sangat terbuka dan transparan. Sistem operasionalnya pakai Jembatan Timbang Online (JTO), data langsung tekoneksi dengan pusat. perubahan sistem juga mampu mengurangi angka pelanggaran," ujar Koordinator Satuan Pelayanan UPPKB Ajibarang, Alkori. Menurut Alkori, setiap hari sekitar 150 kendaraan diperiksa. Ada penurunan angka pelanggaran yang semula sekitar 30 kendaraan sekarang maksimal 10 kendaraan perhari. (Bdi)-d

## LLDikti VI Jateng Ingin Predikat WBBM

**SEMARANG (KR)** - LLDikti VI Jateng berhasil meraih predikat ZI/WBK (zona integritas/Wilayah Bebas Korupsi). Predikat itu diraih pertama kali oleh LLDikti se-Indonesia. Saat ini ada 6 lembaga pendidikan yang berhasil meraih predikat WBBM dan 5 di antaranya adalah perguruan tinggi, sedang satu nya lagi LLDikti Jateng.

Prestasi ini tak terlepas dari kiprah pimpinan (kepala) LLDikti VI Jateng Bhimo Widyo Andoko SH MH yang didukung penuh sekitar 80 Brayat agung (pegawai) di lingkungan LLDikti VI Jateng ini. Mantan Sekretaris LLDikti V DIY ini pun bertekad "membawa" Brayat agungnya tiap tahun selalu menandatangani Pakta integritas sebagai salah satu cara "pengingat" kalau ASN harus selalu amanah.

Dari sisi pengalaman sebagai pengelola LLDikti dan institusi pendidikan pada umumnya, Bhimo bukanlah orang "baru". Sejumlah ja-



KR-Sugeng Irianto

**Bhimo Widyo Andoko SH MH.**

batan di Kementerian Ristekdikti pernah dijabatnya. Di antaranya menjabat sebagai Kepala Seksi pada Dit. Kelembagaan, Kepala Seksi Infrolab (Keterbukaan Informasi UU 14/2008), dan Kabag Publikasi dan Dokumentasi (meletakkan dasar dasar tata kelola informasi di Kementerian Ristekdikti).

Kiprahnya tidak hanya terbatas di dalam negeri saja, Bhimo pernah menjabat sebagai Wakil Atase Pendidikan dan Kebudayaan

Kedubes RI di Washington DC Amerika Serikat (2016-2018) dan Acting Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedubes RI di Washington DC Amerika Serikat (2018-2019). Alumni S1 Fakultas Hukum UNPAD dan S2 Fakultas Hukum Undip ini pun selalu rendah hati dan "open minded" dalam menjalankan tiap kebijakan yang diterapkan di lembaga yang dipimpinnya.

"Penandatanganan Pakta Integritas memiliki makna penting, tidak hanya dalam konteks reformasi, tetapi juga dalam menjalankan tugas serta kinerja sehari-hari. Di samping itu momen ini sebagai tahapan awal pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas pelayanan di LLDikti Wilayah VI. Semoga tahun ini kami bisa meraih predikat WBBM tersebut," ujar Bhimo kepada pers, Sabtu (14/1). (Sgi)-d

## Warga Miskin Terima Bantuan SPALD-S

**TEMANGGUNG (KR)** - Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan bantuan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) pada 550 rumah tangga miskin. Kepala Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung Hendra Sumaryana mengatakan program SPALD-S melalui dana alokasi khusus (DAK) untuk 11 desa dengan target 550 sambungan rumah.

"Program dari DAK ini dalam pelaksanaannya bersifat hibah kepada kelompok masyarakat," kata Hendra Sumaryana, Senin (16/1). Dikemukakan pembangunan SPALD-S antara lain dibangun di Desa Gilingsari, Kecamatan Temanggung, Desa Pendowo, Kecamatan Kranggan, Desa Kemloko, Kecamatan Kranggan, Desa Wadas, Kecamatan Kandangan, Desa Rowo, Kecamatan Kandangan, Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Desa Traji, Kecamatan Parakan,

Desa Mranggen Kidul, Kecamatan Bansari, Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo dan Desa Bansari, Kecamatan Bansari, serta Desa Purborejo, Kecamatan Bansari,

"Masing-masing desa yang mendapat bantuan pembangunan SPALD-S minimal 50 rumah," ujarnya. Dikemukakan bisa saja rumah tersebut sudah ada kamar mandi tetapi belum memiliki septic tank, maka dibuatkan septic tank. Nanti sisa dana bisa digunakan untuk rumah lainnya, sehingga satu desa bisa lebih dari 50 rumah mendapat bantuan dari Kementerian PUPR melalui Direktorat Sanitasi. (Osy)-d

## Pejabat Fungsional Pemkab Temanggung Dilantik

**TEMANGGUNG (KR)** - Mengawali tahun 2023, sebanyak 23 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan hasil evaluasi penyetaraan jabatan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung, Hary Agung Prabowo mengatakan keputusan pelantikan setelah Pemkab Temanggung dan Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi terkait jabatan pada 23 pejabat tersebut.

Dikatakan peningkatan jabatan fungsional hasil penyetaraan dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala.

Kendala itu karena masih ada pejabat fungsional yang diangkat belum memiliki kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi rincian tugas, maupun unit kerjanya, sehingga perlu dilakukan adanya evaluasi. "Penyetaraan ini dimaksud, bahwa sesuai dengan kapabilitas, jabatan terdahulu atau yang disandang dalam pendidikan ter-

akhir harus linier semuanya" kata Hary Agung Prabowo, Sabtu (14/1). Hatu Agung mengatakan pelantikan itu dilakukan pada Kamis (12/1) di Gedung PKK Kabupaten Temanggung.

Disampaikan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/92/M.SM.02.03/2022 Pemkab

Temanggung melakukan evaluasi jabatan fungsional hasil penyetaraan, baik evaluasi terhadap kualifikasi, maupun rincian tugas jabatan fungsional. Hasil evaluasi yang dilakukan Pemkab Temanggung ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/9430/Otda tanggal 26 Desember 2022.

"Penyesuaian ini agar bisa be-

kerja optimal sesuai dengan backgroundnya, sesuai latar belakang pendidikannya," kata Sekda. Dikatakan dengan dilakukan penyetaraan ini, maka para pejabat terlanik dapat memenuhi nilai angka kredit yang dapat dijadikan untuk syarat kenaikan pangkat lebih cepat.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung Rokhmad Fauzi mengatakan pejabat di lingkungan Pemkab harus cakap dan posisi jabatan yang diduduki harus sesuai dengan keahliannya. Sehingga selain keilmuan yang dipelajari dapat diaplikasikan juga mampu mengembangkan keilmuan yang dimiliki.

"DPRD selalu mengingatkan pada Pemkab agar dalam penataan pegawai, personal ditempatkan sesuai dengan keahlian dan keilmuan," katanya. Disampaikan diperlukan pula peningkatan kualitas dan sumberdaya manusia di pemda sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. (Osy)-d



KR-Istimewa

Pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Temanggung.